

Analisis laporan keuangan sektor publik

Neni Machfirah¹, Suharyono², Iskandar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: nenionen@gmail.com

²Email: suharyono@feb.unmul.ac.id

³Email: iskandar@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Hasil analisis yang didapat adalah laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun basis akuntansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah berbasis kas sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis kas menuju akrual dan akrual. Adapun hasil analisis lebih mendalam dalam penelitian ini laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda diharapkan melakukan upaya konsistensi format penyusunan yang beracuan kepada ketentuan yang berlaku yaitu permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Laporan keuangan; laporan keuangan sektor publik

Analysis of public sector financial statements

Abstract

The results of the analysis are that the financial statements of the Samarinda City Regional Revenue Service are not in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 and Permendagri Number 13 of 2006. The accounting basis stipulated in Permendagri Number 13 of 2006 is cash-based while Government Regulation Number 71 of 2010 is based cash to accruals and accruals. The results of a more in-depth analysis in this study the 2013 Samarinda City Regional Revenue Service financial reports in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006. Suggestions that the author can give is in preparing financial reports at the Samarinda City Regional Revenue Service is expected to make efforts to consistency in the compilation format referenced to the applicable provisions namely Permendagri number 13 of 2006 and Government Regulation Number 71 of 2010.

Keywords: *Financial statements; public sector financial statements*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran Berdasarkan informasi awal yang diperoleh penulis, diketahui terdapat beberapa penafsiran yang berbeda yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam membuat laporan keuangan. Masih ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 71 Tahun 2010. Itu dapat dilihat di laporan realisasi anggaran tidak merincikan anggaran dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah secara rinci, pendapatan dari pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tidak dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran. Selain itu, terdapat kekurangan di dalam kolom belanja yaitu tidak adanya belanja tidak terduga dalam laporan realisasi anggaran.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi sektor publik

Menurut Renyowijoyo (2008) menyatakan bahwa Sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik

Bastian (2006) menjelaskan tentang pengertian akuntansi sektor publik adalah: Mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta

Akuntansi pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2012) bahwa Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

Menurut Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro

Standar akuntansi pemerintahan

PP Nomor 71 Tahun 2010 Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

Halim (2007).Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan

METODE

Data yang digunakan Lsponan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota samarinda adalah data sekunder pada tahun Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif artinya tehnik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Tetapi tehnik ini tidak menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya serta tidak menghasilkan teori baru dalam melihat hubungan antara variabel tersebut. Atas dasar itu dapat diketahui kesesuaian dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 dan PP 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kemudian berdasarkan analisis hingga memunculkan kesimpulan sesuai atau tidak sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran

Pada tabel dibawah ini merupakan ringkasan LRA Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Lebih Kurang) (Rp)
Pendapatan	2.697.071.997.283,01	2.567.673.073.696,33	12.939.892.358.668
Pendapatan Asli Daerah:	234.202.424.910,46	208.703.448.188,88	25.498.976.721.58
Pendapatan Pajak Daerah	180.737.978.237,00	197.888.593.241,07	17.150.615.004
Lain-lain PAD yang Sah	43.089.446.673,46	1.284.709.342,05	(41.804.737.331)
Dana Perimbangan	1.442.843.620.896,55	1.465.325.629.189,00	-22.482.008.292.45
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	846.612.432.896,55	876.696.535.189,00	30.084.102.292
Belanja:	47.153.821.985,45	34.157.716.195,00	12.996.105.790.45
Belanja Tidak Langsung	27.104.117.589,45	21.688.154.490,00	(5.415.963.099)
Belanja Pegawai	21.104.117.589,45	21.688.154.490,00	584.036.901
Belanja Pegawai	5.564.785.000,00	2.733.678.200,00	(2.831.106.800)
Belanja Barang & Jasa	10.833.340.396,00	8.076.287.005,00	(2.757.053.391)
Belanja Modal	3.651.579.000,00	1.659.596.500,00	(1.991.982.500,00)
SURPLUS (DEFISIT)	2,597,215,823,371.56	2,403,940,753,982.88	2,403,940,753,982,88

Hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu kesesuaian terletak pada kesamaan pada lampiran A IV Kode Rekening pendapatan Kabupaten/Kota yang diatur dalam permendagri

Laporan arus kas dispenda kota samarinda 2013

Digambarkan sebagai salah satu hasil penelitian dari aktivitas operasi laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 yang didapat dari bagian akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk mendapatkan salah satu data primer dari penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan arus kas yang dapat peneliti sajikan adalah sebagai berikut :

Saldo awal kas per 1 januari Tahun 2013;	Rp. 1.164.188.887.984.97
Arus kas dari aktivitas operasi;	Rp. 975.275.629.541.83
Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan;	Rp.(1.279.406.897.105.00)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan;	Rp. (28.333.549.719.06)
Arus kas dari aktivitas non-anggaran;	Rp. (369.009.478.00)
Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2013;	Rp. 842.519.476.928.74

Berdasarkan perhitungan diatas yang dihimpun peneliti tentang laporan arus kas Dinas pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 berisi tentang Saldo awal kas per 1 januari Tahun 2013 Arus kas dari aktivitas operasi, Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, Arus kas dari aktivitas pembiayaan, Arus kas dari aktivitas non-anggaran dan Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2013.

Laporan Arus Kas tahun 2013 menggambarkan kesesuaian dengan lampiran E dan lampiran VII.3 yang diatur dalam permendagri nomor 13 tahun 2006. Hal ini sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai mana diatur dalam pasal 126 ayat 2 yaitu (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Selanjutnya pada pasal 169 laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan

CaLK dispenda kota samarinda 2013

Sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban sehubungan

SIMPULAN

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006

Penerapan sistem pencatatan dan basis kas pada Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat Dalam Permendagri no. 13 tahun 2006. Namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi 2012, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Muindro Renyowijoyo, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Revrison Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi